

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- a. Perkembangan Inflasi Daerah Pada Triwulan II 2024, Pada Juni 2024, Riau mengalami penurunan secara M-to-M sebesar -0,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,30 persen Inflasi Tahun ke Tahun (Juni 2023 – Juni 2024) sebesar 3,56 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,28 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,62 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,29 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,00 persen, kelompok transportasi sebesar 1,93 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,74 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,03 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,52 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,19 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2024, antara lain: cabai merah, beras, telur ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang merah, emas perhiasan, nasi dengan lauk, mobil, bawang putih, kentang, cabai rawit, ayam hidup, dll. Sementara secara m-to-m pada Maret 2024, antara lain: cabai merah, beras, bawang merah, emas perhiasan, bawang putih, ayam hidup, sigaret kretek, ikan serai, timat, Bahan bakar rumah tangga dll. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota indeks harga konsumen pada bulan juni yaitu: Kab Kampar Inflasi YoY 4,38 persen, Kota Dumai Inflasi YoY 3,78 persen Kab Indragiri Hilir Inflasi YoY 3,14 persen, Kota Pekanbaru Inflasi YoY 3,12 persen. Penyumbang utama inflasi Provinsi Riau bulan Juni 2024 secara y-on-y adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 2,31 persen komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah; Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil 0,46 persen komoditas penyumbang utama pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk; Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan bandil 0,43 persen Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.

1. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok.

Berdasarkan hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok selama triwulan II Tahun 2024 (April – Juni 2024) ada beberapa komoditi yang mengalami fluktuasi harga. Berikut hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar Sukaramai dan Pasar Cik Puan Pekanbaru:

1. Beras

Harga beras di Provinsi Riau pada triwulan II mengalami kenaikan pada bulan Juni sebesar 13% pada beras Bulog dari yang awalnya Rp. 11.500/kg menjadi Rp. 13.000/kg. Harga beras premium masih berada di atas HET;

2. Gula Pasir

Pada triwulan II harga gula di Provinsi Riau relatif stabil. harga gula sedikit mengalami kenaikan sebesar 3%. Harga gula di Provinsi Riau berkisar dari Rp.17.500,- s/d Rp.18.000,-. Harga diatas HET;

3. Minyak Goreng

Minyak goreng yang dipantau adalah minyak goreng curah dan minyak goreng Minyak Kita. Pada Triwulan II harga minyak goreng di Provinsi Riau berkisar pada harga Rp.15.000,- hingga Rp. 16.000,-. Rata-rata harga minyak goreng masih sesuai dengan HET;

4. Daging Ayam

Pada triwulan II relative stabil di Rp. 32.000/kg. kenaikan harga ayam tertinggi terjadi sejak bulan maret dikarenakan tingginya permintaan menjelang hari raya Idul Adha 2024;

5. Telur Ayam Ras

Pada triwulan II harga telur ayam ras relatif stabil. Harga telur ayam rata-rata Rp. 27.700,-/kg;

6. Cabe Merah Keriting

Harga cabe merah keriting triwulan II mengalami kenaikan. Untuk cabe merah keriting mengalami trend kenaikan sebesar 26%. Harga cabe merah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Mei 2024 dengan harga berkisar dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 60.000,- per kilogram;

7. Bawang Merah

Bawang merah pada triwulan II relatif stabil. Pada bulan Mei 2024 harga bawang mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada harga Rp. 52.000,- dan kembali turun menjadi Rp. 40.000,- per kilogram pada bulan Juni 2024;

8. Bawang Putih

Pada triwulan II harga bawang putih berkisar Rp.38.000,- hingga Rp.40.000,- per kilogram. Secara rata-rata harga bawang putih di Provinsi Riau pada triwulan II cukup stabil.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Komoditas yang mengalami kenaikan/penurunan harga yang terjadi pada komoditas Beras, Cabe Merah Keriting dan Telur Ayam Ras:
 - Kenaikan harga beras dan cabe merah keriting di Triwulan II dikarenakan harga beras secara nasional juga mengalami kenaikan akibat dari tingkat produsen dan faktor cuaca;
 - Harga telur ayam ras mengalami penurunan pada bulan Februari, namun pada bulan Juni 2024 harga telur ayam kembali mengalami peningkatan dikarenakan tingginya permintaan menjelang hari raya Idul Fitri.
- b. Adanya faktor gangguan cuaca, dimana pada bulan April hingga Juni curah hujan cukup tinggi hingga menyebabkan longsor di jalur penghubung dari daerah produsen. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya kelancaran arus distribusi barang dari daerah produsen.
- c. Upaya peningkatan produksi padi masih terkendala persoalan mendasar yaitu pengairan belum optimal, sebagian besar lahan sawah tadah hujan, perubahan iklim ekstrim sehingga dampak el-nino berlanjut sehingga mengakibatkan banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), biaya produksi meningkat, harga jual menurun, akses petani terhadap penyuluhan dan pembiayaan terbatas sehingga animo

petani menjadi turun dan berakibat luas tanam dan panen semakin turun

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menganggarkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebanyak 63 titik di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp. 1.228.784.391,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) melalui dana APBD dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui dana APBN;
- b. Melakukan kegiatan Pengendalian, Evaluasi, Stabilitas Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan melaksanakan monitoring ketersediaan stok barang kebutuhan pokok menjelang HBKN;
- c. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk memantau ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok baik di tingkat pengecer maupun distributor;
- d. Melakukan upaya kerjasama dengan daerah penghasil/produsen untuk kelancaran arus distribusi, yakni Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Utara;
- e. Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerjasama dengan Terlaksananya operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) diutamakan pada kecamatan Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga pangan;
- f. Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan. Keikutsertaan Satgas pangan dalam Rapat Koordinasi TPID dan dalam kegiatan lainnya seperti sidak pasar;
- g. Diversifikasi Pangan Lokal, Konsumsi beras per kapita menurun, konsumsi bahan pangan karbohidrat lainya meningkat;
- h. Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan;
 - i. Meningkatkan jumlah kelompok yang mengembangkan olahan produk pangan lokal;
 - j. Meningkatkan kelompok pemanfaatan pekarangan;
 - k. Penyusunan Database Ketersediaan Pangan;
 - l. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- m. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- n. Pola Pangan Harapan (PPH), pembinaan pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman);
- o. Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis;
- p. Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pangan pokok di website;
- q. Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan telah diambil kebijakan sebagai berikut:
 - Bantuan Benih dan Pupuk pada Kegiatan PIP (Peningkatan Indeks Pertanaman)/PAT (Perluasan Areal Tanam) seluas 6.000 Ha (APBD), Peningkatan Produktivitas 600 Ha (APBD) dan Bantuan Benih Inbrida 1.000 Ha (APBN);
 - Peningkatan alsintan pra panen dan pasca panen untuk efisiensi dan efektifitas budidaya dan pasca panen melalui penyediaan alat panen Combine Harvester Besar sebanyak 11 unit, Alat perontok padi Power Thresher sebanyak 6 unit, RMU Mini sebanyak 1 unit, alat angkut Kendaraan Roda-3 sebanyak 5 unit, Traktor Roda-4 sebanyak 13 unit, Traktor Roda-2 sebanyak 29 unit, mesin tanam Rice Transplanter sebanyak 3 unit dan Pompa Air sebanyak 9 unit;
 - Pelaksanaan Kerjasama Pemprov Riau dengan Korem 031/WB tentang Upaya Khusus Gerakan Daerah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dalam

Rangka Penyediaan Pangan di Provinsi Riau melalui Pembentukan Satuan Tugas Upaya Khusus Upaya Khusus Gerakan Daerah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Provinsi Riau.

- r. Melaksanakan Pengembangan Kawasan Cabe berupa Penyediaan bibit bermutu, peningkatan sarana dan prasarana, Gerdal Horti, Peningkatan pengetahuan & keterampilan SDM Pertanian, Peningkatan luas tanam melalui sumber dana APBD Tahun 2024, dengan areal pengembangan cabe seluas 50 ha, rincian sebagai berikut: Kota Pekanbaru 10 Ha, Kota Dumai 10 Ha, Indragiri Hilir 5 Ha, Rokan Hulu 10 Ha, Kampar 5 Ha, Rokan Hilir 5 Ha, Siak 5 Ha. Pada saat ini kegiatan pengembangan kawasan cabai berupa bantuan bibit dan saprodi telah selesai didistribusikan kepada kelompok tani penerima, dan perkiraan penanaman akan dilakukan pada Bulan Mei-Juni 2024;
- s. Melaksanakan Pengembangan Kawasan Bawang Merah melalui sumber dana APBD Tahun 2024, dengan areal pengembangan Bawang merah seluas 5 ha, rincian sebagai berikut: Kota Pekanbaru 2 Ha, Kota Dumai 2 Ha, Indragiri Hilir 1 Ha Pada saat ini kegiatan pengembangan kawasan bawang merah masih dalam proses pengadaan;
- t. Melaksanakan Kegiatan Gerakan Menanam Cabe dan Bawang Merah di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kampar, melalui pembagian benih cabe/bawang merah dan polybag, dalam rangka mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga khususnya cabe/bawang merah, Kegiatan Gerakan Menanam Cabe/Bawang Merah telah dilaksanakan di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai;
- u. Menyelenggarakan Gelar Pasar Tani/pasar Murah di 11 Kabupaten/Kota, sebanyak 19 kali. Gelar Pasar Tani/pasar murah telah dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan rincian di Kota Pekanbaru sebanyak 10 kali, Kabupaten Kampar 2 kali, Kota Dumai 1 kali dan Kabupaten Pelalawan 1 kali;
- v. Menyelenggarakan Gelar Pasar Tani Mobile di Kota Pekanbaru sebanyak 6 kali (akan dilaksanakan mulai Mei 2024);
- w. Pengadaan Sarana Pasca Panen (Kendaraan Roda 3) untuk Komoditas Cabe Merah/Bawang Merah/Sayuran lainnya sumber dana APBD di Kabupaten Siak 2 unit, Bengkalis 3 unit dan Rokan Hulu 3 unit, sudah selesai didistribusikan ke Kabupaten/Kota penerima bantuan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerjasama dengan Bapanas;
- b. Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan, Bersama mengawasi distributor penyuplai bahan pangan strategis dalam hal ketersediaan bahan pangan strategis dan harga bahan pangan strategis serta membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- c. Penyusunan Database Ketersediaan Pangan, tersedianya database ketersediaan pangan untuk mengetahui daerah yang mengalami surplus/defisit ketersediaan pangan strategis;
- d. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Tersedianya CPPD untuk menjaga ketersediaan beras jika terjadi fluktuasi harga beras, defisit pasokan beras, gagal panen, serta terjadinya bencana alam;
- e. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Tersedianya database

SKPG untuk mengetahui daerah yang mengalami rawan pangan dan aman pangan dalam hal ketersediaan pangan;

- f. Pola Pangan Harapan (PPH), tersampainya sosialisasi konsumsi bahan makanan dengan cara B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) kepada masyarakat serta untuk mengetahui tingkat keberagaman konsumsi masyarakat di Provinsi Riau;
- g. Prognosa Ketersediaan Pangan. Tersedianya database prognosa ketersediaan pangan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan pangan strategis di bulan/tahun yang akan datang;
- h. Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis. Tersedianya informasi mengenai mengenai produksi, stok, dan harga pangan strategis;
- i. Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pangan pokok di website. Tersedianya harga di tingkat konsumen, produsen, grosir, dan eceran di 3 pasar utama;
- j. Penguatan kualitas statistik harga bahan makanan. Sinergi pencatatan harga antara Dinas Perindagkop, Dinas PTPH, Polda Riau, Bank Indonesia dan BPS Provinsi Riau untuk bersama mengawasi harga pangan strategis;
- k. Dampak Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan yaitu:
 - Peningkatan luas tanam periode Januari - Maret 2024 dibanding dengan periode Januari-Maret 2022-2023, berturut-turut pada tahun 2022 luas tanam 12.890 ha, tahun 2023 luas tanam 15.954 ha dan tahun 2024 luas tanam 19.238 ha;
 - Peningkatan alsintan pasca panen tersebut dapat menekan biaya produksi khususnya pada proses panen, mengurangi kehilangan panen dan meningkatkan mutu hasil panen;
 - Akselerasi Gerakan Daerah Penyediaan Pangan melalui Upaya Khusus dan Kerjasama dengan TNI dapat mengoptimalkan dan sinerginya program-program peningkatan produksi dan produktivitas.
- l. Pengembangan kawasan cabai/ bawang merah memang akan berpengaruh langsung terhadap produksi dalam rangka pengendalian inflasi, karena kita ketahui, Provinsi Riau hanya mampu menyediakan cabai merah sebanyak 36%, sehingga penting bagi Provinsi Riau menambah anggaran untuk pengembangan kawasan cabai dan bawang. Sejauh ini kebijakan yang dilakukan oleh Bidang Hortikultura juga berpengaruh langsung terhadap kelompok tani yang memperoleh fasilitasi (baik bantuan, pelaksanaan pasar tani/pasar murah, pelaksanaan SL GAP) maupun masyarakat sekitar kelompok tani tersebut. Namun, dikarenakan alokasi anggaran yang minim, pengaruhnya belum signifikan terhadap pengendalian inflasi tingkat Provinsi Riau. Selain itu kegiatan Pasar Tani juga berpengaruh terhadap pengendalian inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerjasama dengan Diharapkan para Bank Indonesia, BUMD Pangan Kota Pekanbaru, BUMD Pangan Provinsi Riau , Bulog dan ID Food ikut berpartisipasi dalam penyediaan beraneka bahan pokok srategis dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM);
- b. Peningkatan Ketersediaan Produksi Tanaman Pangan yaitu:
 - Perlu adanya pembenahan sistem produksi, penguatan sistem produksi dan daya saing, kemudian perluasan sistem produksi serta penguasaan pasar;
 - Upaya khusus peningkatan produksi difokuskan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pemanfaatan lahan, sedangkan peningkatan produktivitas dengan penggunaan benih unggul melalui

penyediaan benih unggul melalui pengembangan penangkaran dan penerapan budidaya ramah lingkungan;

- Revitalisasi penggilingan kecil dan Pengembangan Contract Farming melalui penugasan BUMD dan BUMdes sebagai offtaker penampungan dan pemasaran hasil produksi.